

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KECAMATAN GELUMBANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

©Subbag.Perencanaan dan Keuangan,2025.



Kata Pengantar

Alhamdulillah, hanya dengan perkenan Allah SWT., Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 OPD Kecamatan Gelumbang ini dapat disusun dan diselesaikan, sebagai pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan atas kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bupati Muara Enim dan Laporan ini dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja Tahun 2024.

Rasa terima kasih Kami haturkan kepada para pejabat struktural dan staf di lingkungan OPD Kecamatan Gelumbang atas kerjasama serta kontribusi pemikiran dan masukan juga data-data yang sangat mendukung penyelesaian laporan ini.

Kami mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang telah disusun ini dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga target-target yang telah ditentukan dapat terpenuhi. Harapan kami penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan lebih baik lagi di tahun yang akan datang, Aamiin.

Gelumbang, 01 Januari 2025

CAMAT GELUMBANG



HERRY MULYAWAN, S.P., MM
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19720508 199903 1 003

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, OPD Kecamatan Gelumbang telah menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan. Ditinjau dari sudut pencapaian sasaran OPD Kecamatan Gelumbang masuk dalam kategori *sangat baik* dengan rata-rata capaian di atas 91% hingga melampaui 100% untuk 2 (Dua) sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, dianggarkan dana sebesar Rp. 7.298.144.037,00 untuk membiayai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.830.647.184,00 atau sebesar 93,59%. Pencapaian tersebut diharapkan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP OPD Kecamatan Gelumbang ini dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian tujuan organisasi Kecamatan Gelumbang yaitu :

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan”.

Gelumbang, 21 Januari 2025

CAMAT GELUMBANG



HERRY MULYAWAN, S.P., MM
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19720508 199903 1 003



Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum dan Gambaran Pelayanan OPD.....	2
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	8
D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP	10
E. Format Penulisan LKjIP	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Perencanaan Kinerja	13
1. Tujuan	13
2. Sasaran	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD	17
A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja	17
B. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2024	18
C. Analisis atas Pencapaian Keuangan Tahun 2024	31
1. Belanja Operasi	34
2. Belanja Modal	45
D. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024	48
BAB IV PENUTUP	49
A. Permasalahan dan Solusi	49
B. Kesimpulan	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Lain-lain yang dianggap Perlu	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimaksud dengan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja ini disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disampaikan.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim



sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

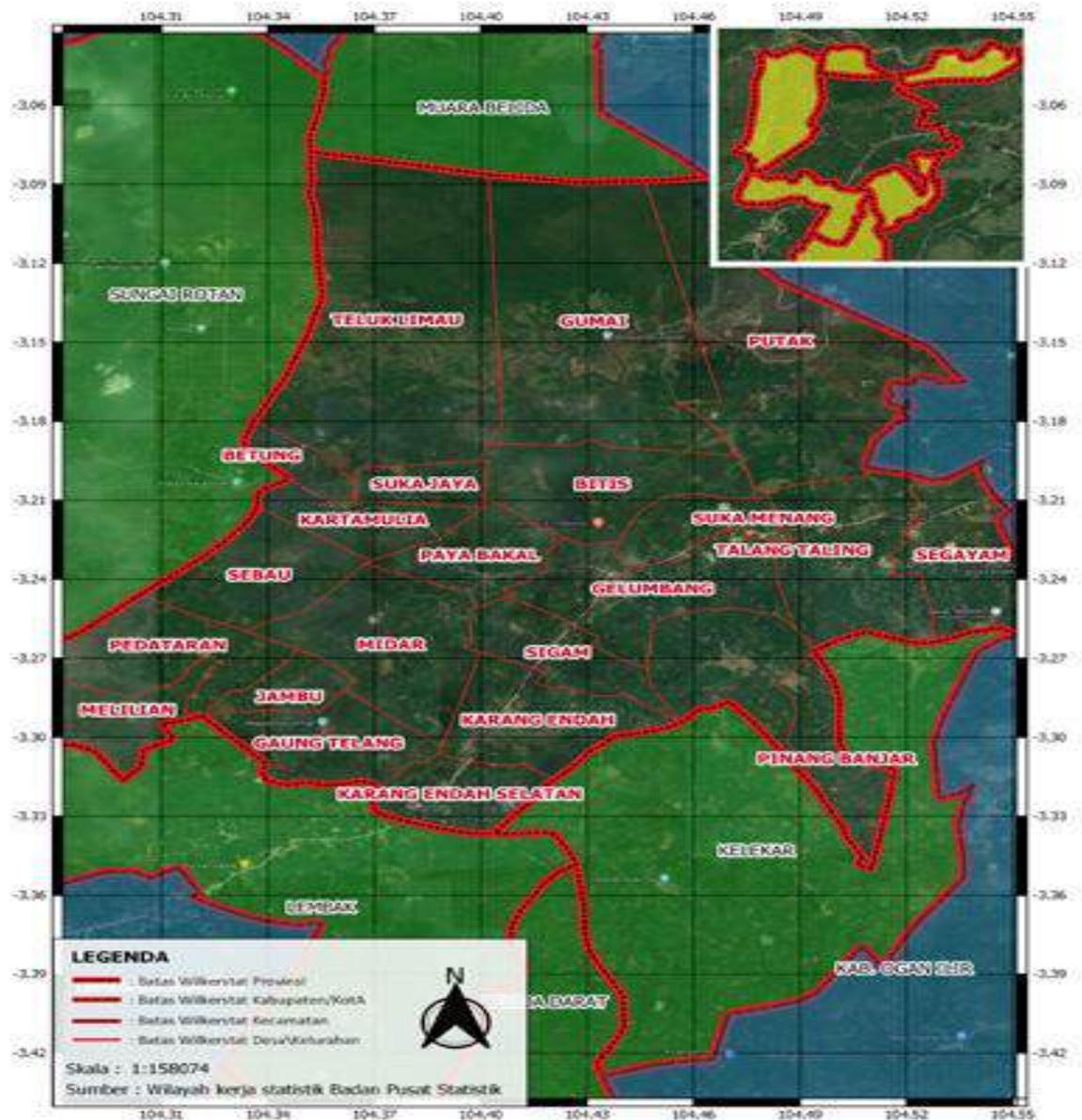
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Data Umum dan Gambaran Pelayanan OPD

Kecamatan Gelumbang merupakan Kecamatan yang terletak dibagian tengah dari Wilayah Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah sekitar $\pm 489,73 \text{ km}^2$ (*Kecamatan Gelumbang dalam Angka Gelumbang District in Figures 2024, BPS Kabupaten Muara Enim, 2024*), dengan jumlah desa sebanyak 22 desa dan 1 kelurahan. Batas- batas administrasi Kecamatan Gelumbang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Belida
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelekar dan Kabupaten Ogan Ilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Rotan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir

Peta Wilayah Kecamatan Gelumbang



Sumber: Kecamatan Gelumbang dalam Angka Gelumbang District in Figures 2024, BPS Kabupaten Muara Enim, 2024.

Jumlah penduduk Kecamatan Gelumbang Tahun 2024 adalah sebanyak 63.560 jiwa dengan 32.365 laki-laki dan 31.195 perempuan. **(Kecamatan Gelumbang dalam Angka Gelumbang District in Figures 2024, BPS Kabupaten Muara Enim, 2024).**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim memiliki potensi sumberdaya manusia (SDM) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada saat ini berjumlah 44 (Empat Puluh Empat) Orang, terdiri dari:



Tabel 1.1
Data Pegawai

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai:			
	ASN	10	8	18
	Non ASN	19	7	26
	Jumlah	29	15	44
2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	1	1	2
	Golongan III	5	5	10
	Golongan II	4	1	5
	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	10	7	17
3	Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan Penjejjangan Terakhir:			
	Diklatpim III	1	0	1
	Diklatpim IV/Adum/PKP	6	4	10
	Jumlah	7	4	11
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan:			
	Strata 2 (Magister)	3	2	5
	Strata 1 (S1)	7	12	19
	Diploma III	0	0	0
	SLTA	17	1	18
	SMTP	2	0	2
	Jumlah	31	15	46
5	Jumlah Pegawai yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang Jasa:			
	L-IV	0	0	0
	L-II	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gelumbang, 2024.

Secara lengkap data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer lingkup OPD Kecamatan Gelumbang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.2
Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer
pada OPD Kecamatan Gelumbang

No.	Nama/NIP.	NIP.	Gol.	Keterangan
1	Herry Mulyawan, S.P., MM	19720508 199903 1 003	IV/b	Camat
2	Irhamnah, S.Ag., M.M.	19721006 200701 2 001	IV/a	Sekcam
3	Ahyaudin, S.Sos.	19680617 199002 1 001	III/d	Kasi Pemerintahan
4	Misriyani, S.Sos.	19741207 200604 2 007	III/c	Kasi PEMBERDAYAAN dan PEMBANGUNAN
5	M. Rinaldi Sahrizal, S.STP., M.Si	19921207 201507 1 001	III/b	Kasi Pelayanan Umum
6	Sawaludin, S.Sos., M.A.P	19751009 200906 1 002	III/b	Kasi Trantibum
7	Lismarama Warni, S.E.	19710418 199203 2 007	III/c	Lurah
8	Lidya Pitriasari R., S.E., M.A.P	19780110 200604 2 005	III/c	Ksb. Perencanaan dan Keuangan
9	Edward Fansyuri, S.Ag.	19760623 201101 1 006	III/c	Sekur
10	Juenita, S.E.	19731208 200003 2 002	III/c	Kasi Pelayanan Umum dan Kessos Kelurahan
11	Marzuki, S.Sos.	19720727 200906 1 002	III/a	Analisis Pemerintahan Daerah
12	Kamelia Aprianti, S.T.	19810407 201503 2 001	III/a	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
13	Rumlan	19701215 200906 1 011	II/c	Pranata Perlindungan Masyarakat
14	Zulkarnain	19720605 200906 1 002	II/c	Bendahara Pengeluaran
15	Syarifudin	19700101 200906 1 002	II/c	Pengadministrasi Perencanaan dan Program



16	Elya Rosa	19781030201001 2 003	II/c	Pengadministrsi Umum Kelurahan
17	Wani	19703107 200906 1 002	II/a	Pengadministrasi Persuratan
18	Rina Yulianti, S.Sos		IX	PPPK Penggerak Swadaya Masyarakat
19	Mudiman	-	-	Honoror/Tenaga Keamanan Kantor
20	Anisha Panisti, S.Sos.	-	-	Honoror/Tenaga Administrasi PATEN
21	Lhónico, S.Sos.	-	-	Honoror/Tenaga Operator SIAK
22	Erka Susana, S.E.	-	-	Honoror/Tenaga Administrasi PATEN
23	Okta Herdiansyah, S. AP.	-	-	Honoror/Tenaga Keamanan Kantor
24	Yupi Yuli Yanti, S. Sos.	-	-	Honoror/Tenaga Kebersihan Kantor
25	Eka Susanti, S. Kom.	-	-	Honoror/Tenaga Operator SIAK
26	Pahmi Saputra	-	-	Honoror/Tenaga Kebersihan Kantor
27	Sri Rezeky Amalia, S.E.	-	-	Honoror/Tenaga Operator PATEN
28	Eci Admelya, S. Sos.	-	-	Honoror/Tenaga Operator Kelurahan
29	Dimas Arisandi	-	-	Honoror/Tenaga Keamanan Kantor Lurah
30	M. Asaab	-	-	Honoror/Tenaga Kebersihan Kantor Lurah
31	Hadi Purnama	-	-	Damkar



32	Januar Putra Bungsu	-	-	Damkar
33	Deni Yansyah	-	-	Damkar
34	Desy Purnama Sari, S.Ak.	-	-	Damkar
35	Asrobu, SP.	-	-	Damkar
36	Sapuan	-	-	Damkar
37	Fajri Febriansyah	-	-	Damkar
38	Rahman	-	-	Damkar
39	Ruslan	-	-	Damkar
40	Suryanto	-	-	Damkar
41	Febri Harisandy	-	-	Damkar
42	Abdul Hafiz	-	-	Damkar
43	Rahmat Afriansyah	-	-	Damkar
44	Hijelal Hibatullah	-	-	Honoror/Tenaga Kebersihan Kantor

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gelumbang, 2024.

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim adalah merupakan salah satu dari 22 (Dua Puluh Dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Terdiri dari



22 (Dua Puluh Dua) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan. Sebagaimana Kecamatan yang lain OPD Kecamatan Gelumbang adalah juga merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Secara rill bentuk pelayanan yang rutin antara lain pelayanan terhadap pengurusan Kartu Keluarga (KK), Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pengantar Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembuatan Surat Pengantar dan rekomendasi berbagai keperluan masyarakat, legalisasi Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan sebagainya.

C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 No. 2) sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3), struktur organisasi OPD Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terdiri atas:

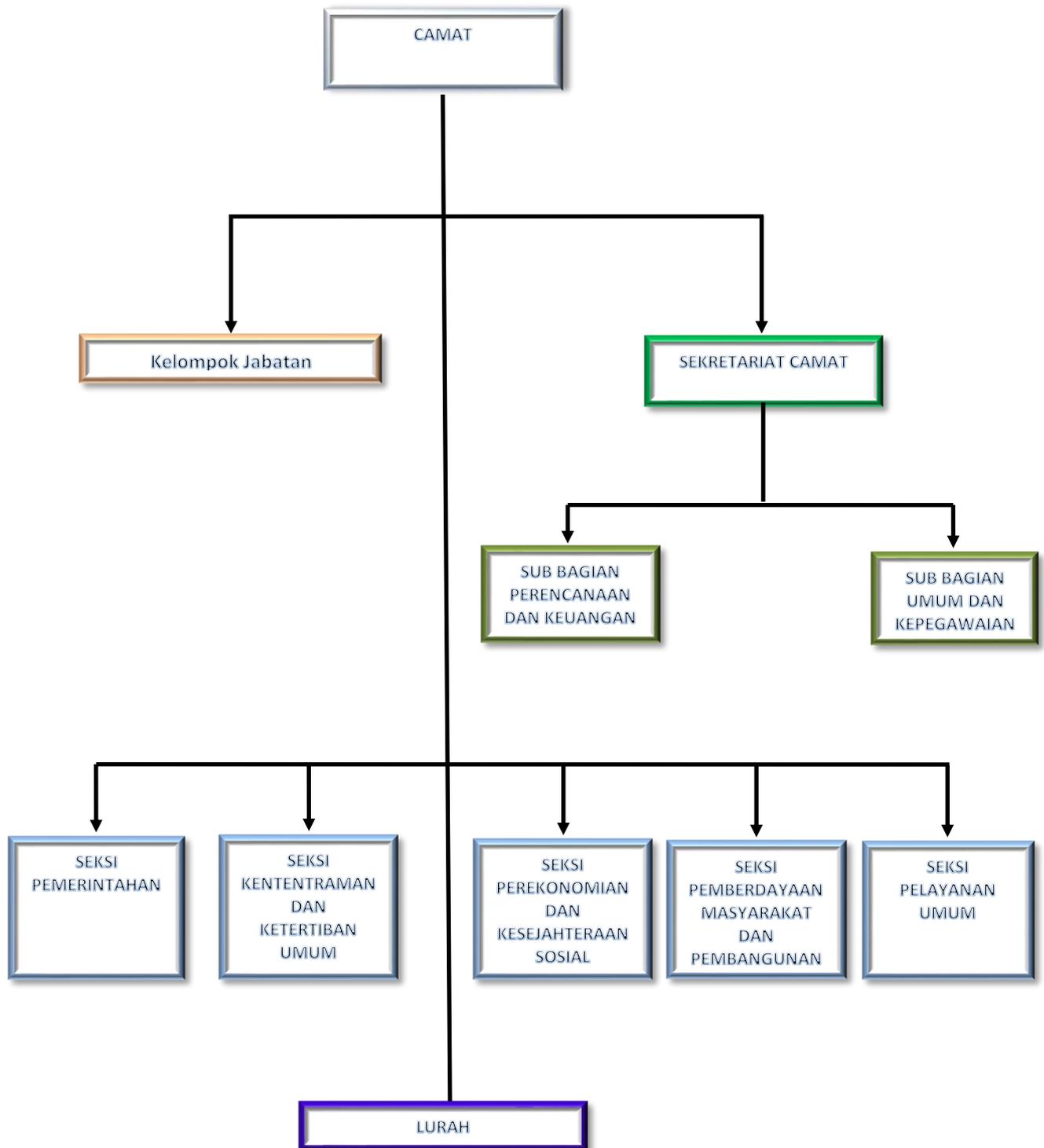
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
 - a. Subbag. Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Struktur Organisasi Kecamatan dapat ditampilkan dengan bagan sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA
ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2016
TANGGAL 14 OKTOBER 2016*



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gelumbang, 2024.



Tugas pokok dari Kecamatan adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP)

Penyusunan LKjIP OPD Kecamatan Gelumbang dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024 serta pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi Tahun Anggaran 2024 yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Gelumbang berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang ditentukan.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu:

1. Sarana bagi OPD Kecamatan Gelumbang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat).



2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP OPD Kecamatan Gelumbang antara lain :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja OPD Kecamatan Gelumbang Tahun Anggaran 2024;
2. Mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Gelumbang;
3. Sebagai input dan umpan balik (*feedback*) untuk meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Gelumbang;
4. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Muara Enim;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

E. Format Penulisan LKjIP

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini digunakan untuk menginformasikan pencapaian kinerja pemerintah OPD Kecamatan Gelumbang selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis dan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Ketiga unsur penting diatas disajikan dalam bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan data umum dan gambaran pelayanan, struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Gelumbang

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian singkat mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2024. Pada awal bab ini juga disajikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis yang mencakup visi dan misi serta tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Gelumbang.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Dalam bab ini disajikan analisa capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Kecamatan Gelumbang. Juga diuraikan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan capaian kinerja OPD Kecamatan Gelumbang Tahun 2024 dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Perencanaan meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis OPD Kecamatan Gelumbang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Tetapi sehubungan dengan kekosongan Kepala Daerah visi dan misi tersebut belum ditetapkan. Sehingga penyusunan Renstra OPD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya. Membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka di harapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran , penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ikhtisar Rencana strategis OPD Kecamatan Gelumbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi dimaksud.



Dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 serta tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan OPD Kecamatan Gelumbang adalah ***“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan”***.

2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran OPD Kecamatan Gelumbang sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Tahun 2024 – 2026 disusunlah rencana kinerja (performance plan)/rencana kerja tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya.

Rencana Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang sasaran, indikator sasaran serta target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran tersebut. Dalam perencanaan kinerja (Renja)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 diuraikan sasaran – sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024, sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024.



Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
OPD Kecamatan Gelumbang
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a. Indeks kepuasan masyarakat	85% (Baik)
		b. Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90 %
		c. PKK aktif	100 %
		d. Persentase sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik	85 %
		e. Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85 %
		f. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	a. Nilai SAKIP Kecamatan	59,95 (CC)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), paling lambat 1 (Satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada OPD Kecamatan Gelumbang dengan harapan perjanjian



kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan atasan (Bupati) dapat diwujudkan pada setiap tahun anggaran.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN GELUMBANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
		2. Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%
		3. PKK Aktif	100%
		4. Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%
		5. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%
		6. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA OPD

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas kinerja OPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban OPD dalam menginformasikan kepada stakeholder sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra OPD, sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

OPD Kecamatan Gelumbang sebagai salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Muara Enim, khususnya masyarakat Kecamatan Gelumbang, melaksanakan kewajiban dalam memberikan informasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja pemerintah didasarkan pada Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja (performance plan) yang dibandingkan dengan realisasinya (performance result). Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada

pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. Analisis atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2024

Pada tahun 2024 secara umum OPD Kecamatan Gelumbang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gelumbang. Selain itu OPD Kecamatan Gelumbang berhasil memperoleh beberapa penghargaan dari pelaksanaan tugas tersebut. Penghargaan tersebut antara lain adalah:

- (1) Perangkat Daerah Terbaik ke-1 Kategori Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
- (2) Juara II Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Afi-Desa Putak);
- (3) Juara Harapan II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2024 (Desa Kartamulia);
- (4) Juara III Lomba Swadaya Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Desa Gaung Telang);
- (5) Juara I Penilaian Kinerja Kader Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Eka Novitawati-Desa Midar);
- (6) Juara I Kategori Umum pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Posyantek Kecamatan Gelumbang);
- (7) Juara I Kategori Sekolah pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (SMK Negeri I Gelumbang);
- (8) Juara III Lomba Lagu Daerah Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (SMA Negeri I Gelumbang);
- (9) Top 10 Inovasi Kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

(10) Komitmen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024 serta Capaian 100% Desa Kelurahan Memiliki Perdes Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Dari sasaran yang telah ditetapkan telah dilaksanakan 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan yang berpedoman pada DPA dan DPPA untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dari pelaksanaan program yang menjadi tolak ukur sasaran dengan kegiatan yang menjadi indikator kinerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Pengukuran capaian sasaran telah diupayakan dengan indikator setingkat *outcome*.

Capaian sasaran dapat di kelompokkan menjadi beberapa tingkat, yaitu:

1. *Sangat baik* dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar $\geq 91\%$;
2. *Baik* dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 81%-90%;
3. *Cukup* dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 71%-80%;
4. *Kurang* dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar $\leq 70\%$;
5. *Sangat kurang* dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 0%.

Berdasarkan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan OPD Kecamatan Gelumbang yang terdiri dari 2 (Dua) sasaran yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan 7 (Tujuh) indikator kerjanya yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat, (2) Persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi, (3) PKK aktif, (4) Persentase sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik, (5) Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti, (6) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan (7) Nilai SAKIP Kecamatan, semuanya masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan rata-rata capaian di atas 91% hingga melampaui 100%.

Rincian capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86,2	108 %
		Persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%	100%	100%
		PKK aktif	100%	100%	100 %
		Persentase sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%	100%	117%
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%	100%	111%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	59,95	60,35	100,67%

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran tersebut dibuat 6 (Enam) indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Terhadap indikator keberhasilan terkait indeks kepuasan masyarakat realisasinya baik sesuai dengan hasil kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat sebagai responden melalui media sosial.

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Gelumbang melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu: (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dan (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Capaian indikator sasaran ini sesuai target.

b. Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi

Salah satu indikator umum yang digunakan untuk mengetahui persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi adalah berapa banyak sub kegiatan rutin kantor yang telah dilaksanakan oleh OPD dari kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan} / \text{Jumlah Sub Kegiatan yang} \\ &\quad \text{direncanakan}) \times 100\% \\ &= (20 \text{ Sub Kegiatan} / 20 \text{ Sub Kegiatan}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator sasaran ini telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Gelumbang melalui beberapa Program dan Kegiatan beserta Sub Kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (Tujuh) Kegiatan, yaitu:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. PKK Aktif

PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Persentase PKK aktif di Kecamatan Gelumbang adalah 100% dari 23 (Dua Puluh Tiga) kelompok PKK yang ada, yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) kelompok PKK Desa dan 1 (Satu) kelompok PPK Kelurahan.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah PKK Aktif} / \text{Jumlah PKK}) \times 100\% \\ &= (23 \text{ PKK} / 23 \text{ PKK}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Terhadap indikator keberhasilan PKK aktif telah dilaksanakan sesuai Renstra OPD Kecamatan Gelumbang melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

d. Cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dalam Kondisi Baik

Terkait indikator keberhasilan cakupan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dalam Kondisi Baik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta. Pada tahun 2024 ini terlaksana 2 (Dua) pekerjaan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum yaitu pemeliharaan lampu jalan sebanyak 100 (Seratus) titik dan lanjutan pembangunan taman bermain di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Gelumbang.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah pemeliharaan/pembangunan yang dilaksanakan/Target rencana pemeliharaan/pembangunan}) \\ &= (2 \text{ Paket}/2 \text{ Paket}) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan realisasi sebesar 100% dari kegiatan ini maka sampai dengan Tahun 2024 ini sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik di Kecamatan Gelumbang mencapai 85%.

- e. Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti

Terkait indikator keberhasilan persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Pada Tahun 2024 ini pelanggaran K3 yang terjadi adalah adanya keresahan karena adanya anak-anak punk yang berkeliaran di area publik Kelurahan Gelumbang. Masalah ini ditindaklanjuti dengan penertiban dan penandatanganan surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi/ Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}) \\ &= (2 \text{ pelanggaran}/2 \text{ pelanggaran}) \times 100\% \end{aligned}$$

= 100%

Dengan realisasi sebesar 100% dari kegiatan ini maka sampai dengan Tahun 2023 ini sarana dan prasarana fasilitas umum dalam kondisi baik di Kecamatan Gelumbang mencapai 85%.

f. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Terkait indikator keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 (Dua) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui Subkegiatan (a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui Subkegiatan (a) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa, dan (b) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Perhitungan persentase realisasi indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

= (Jumlah Program yang dilaksanakan/Jumlah Program yang direncanakan)
= (2 Program/2 Program) x 100%
= 100%

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran ini, dibuat 1 (Satu) indikator sasaran sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP Kecamatan

Sebagai bentuk pengukuran pencapaian terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan dibuat 1 indikator sasaran yaitu: nilai SAKIP Kecamatan. Nilai SAKIP Kecamatan Gelumbang pada Tahun 2024 adalah 60,35 yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Subkegiatan yaitu: (1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, (2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan (3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 (satu) Subkegiatan yaitu: (1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Untuk melihat lebih rinci target dan capaian kinerja OPD Kecamatan Gelumbang pada Tahun 2024 per program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut:



**Tabel Target dan Realisasi Keuangan dan Kinerja
Kecamatan Gelumbang
Tahun 2024**

NO.	Perangkat Daerah Pelaksana	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		Anggaran (Rp)	Target Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Target Output (%)	Realisasi Output (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	KECAMATAN GELUMBANG	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.830.647.184	100	3.768.413.808	92,39	100	100
		1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.727.400	100	7.977.400	91,41	100	100
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.306.500	100	2.556.500	77,32	100	100
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.413.200	100	2.413.200	100	100	100
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.007.700	100	3.007.700	100	100	100
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.428.753.733	100	2.204.074.813	90,75	100	100
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.425.360.733	100	2.200.681.813	90,74	100	100
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.084.500	100	3.084.500	100	100	100
		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.775.000	100	-	-	100	100
		1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.775.000	100	-	-	100	100
		4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.582.900	100	38.567.900	62,63	100	100
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.155.000	100	18.990.000	85,71	100	100
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	100	7.500.000	27,78	100	100
		3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.427.900	100	12.077.900	97,18	100	100
		5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	729.524.252	100	708.654.847	97,14	100	100
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	213.479.000	100	206.989.000	96,96	100	100



1		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.465.752	100	127.012.000	96,61	100	100
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.410.400	100	64.509.100	92,94	100	100
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.339.900	100	5.920.200	57,26	100	100
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.513.200	100	15.930.000	96,47	100	100
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.316.000	100	288.294.547	99,99	100	100
		6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.245.275	100	154.570.000	95,27	100	100
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.688.000	100	28.890.000	91,17	100	100
		2	Pengadaan Mebel	130.557.275	100	125.680.000	96,26	100	100
		7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.565.753	100	91.177.848	87,20	100	100
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.294.400	100	6.290.000	99,93	100	100
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.341.353	100	51.957.848	79,52	100	100
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000	100	3.650.000	100	100	100
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.280.000	100	29.280.000	100	100	100
		8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.584.322	100	373.641.000	64,69	100	100
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.637.081	100	5.147.000	37,74	100	100
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.417.981	100	14.314.000	92,84	100	100
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540.899.260	100	536.300.000	99,15	100	100
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.630.000	100	7.630.000	100	100	100
		2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	417.407.400	100	410.430.800	98,33	100	100



	1	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	280.680.000	100	279.300.000	99,51	100	100
	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	280.680.000	100	279.300.000	99,51	100	100
	2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	136.727.400	100	131.130.800	95,91	100	100
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	50.329.500	100	50.322.300	99,99	100	100
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	50.329.600	100	50.328.500	100	100	100
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.068.300	100	30.480.000	84,51	100	100
	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.897.988.802	100	1.825.520.176	96,18	100	100
	1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	535.935.495	100	479.104.300	89,40	100	100
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.393.595	100	40.960.500	98,95	100	100
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	494.541.900	100	438.143.800	88,60	100	100
	2	Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	1.362.053.307	100	1.346.415.876	98,85	100	100
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.930.100	100	3.637.600	92,56	100	100
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	796.000.000	100	792.940.000	99,62	100	100
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	562.123.207	100	549.838.276	97,81	100	100
	4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	322.368.100	100	276.511.000	85,77	100	100
	1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	322.368.100	100	276.511.000	85,77	100	100
	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	322.368.100	100	276.511.000	85,77	100	100
	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	548.922.200	100	517.364.700	94,25	100	100



			1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	548.922.200	100	517.364.700	94,25	100	100
			1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	385.484.600	100	376.631.500	97,70	100	100
			2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	163.437.600	100	140.733.200	86,11	100	100
			4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.698.900	100	32.406.700	99,11	100	100
			1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.698.900	100	32.406.700	99,11	100	100
			1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.984.900	100	17.772.700	98,82	100	100
			2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14.714.000	100	14.634.000	99,46	100	100
			JUMLAH		7.298.144.037	100	6.830.647.184	93,59	100	100

C. Analisis atas Pencapaian Keuangan Tahun 2024

Anggaran belanja OPD Kecamatan Gelumbang setelah perubahan pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.298.144.037,00. yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp. 6.120.538.724,00 dan belanja modal sebesar Rp. 1.177.605.313,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 6.830.647.184,00 atau 93,59% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 5.670.172.184,00 atau 92,64% dan belanja modal sebesar Rp. 1.160.475.000,00 atau sebesar 98,55%.

Target pencapaian keuangan OPD Kecamatan Gelumbang mengikuti target pencapaian keuangan Kabupaten Muara Enim yaitu 80%. Tahun 2024 pencapaian keuangan OPD Kecamatan Gelumbang adalah 93,59%.

Adapun rincian pencapaian keuangan OPD Kecamatan Gelumbang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

REKAPITULASI BELANJA PER JENIS KECAMATAN GELUMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Gelumbang	6.120.538.724	5.670.172.184	1.177.605.313	1.160.475.000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.262.556.440	2.964.838.808	816.202.195	803.575.000
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.727.400	7.977.400	0,00	0,00
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.306.500	2.556.500	0,00	0,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.413.200	2.413.200	0,00	0,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.007.700	3.007.700	0,00	0,00
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.428.753.733	2.204.074.813	0,00	0,00
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.425.360.733	2.200.681.813	0,00	0,00



	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.393.000	3.393.000	0,00	0,00
C		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.775.000	0,00	0,00	0,00
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.775.000	0,00	0,00	0,00
D		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.582.900	38.567.900	0,00	0,00
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.155.000	18.990.000	0,00	0,00
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.000.000	7.500.000	0,00	0,00
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12.427.900	12.077.900	0,00	0,00
E		Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.386.592	594.589.847	117.137.660	114.065.000
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	213.479.000	206.989.000	0,00	0,00
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.328.092	12.947.000	117.137.660	114.065.000
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.410.400	64.509.100	0,00	0,00
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.339.900	5.920.200	0,00	0,00
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.513.200	15.930.000	0,00	0,00
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.316.000	288.294.547	0,00	0,00
F		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.360.000	1.360.000	160.885.275	153.210.000
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	680.000	680.000	31.008.000	28.210.000
	2	Pengadaan Mebel	680.000	680.000	129.877.275	125.000.000
G		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.565.753	91.177.848	0,00	0,00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.294.400	6.290.000	0,00	0,00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.341.353	51.957.848	0,00	0,00
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000	3.650.000	0,00	0,00
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.280.000	29.280.000	0,00	0,00
H		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.405.062	27.091.000	538.179.260	536.300.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	13.637.081	5.147.000	0,00	0,00



		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.417.981	14.314.000	0,00	0,00
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.720.000	0,00	538.179.260	536.300.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.630.000	7.630.000	0,00	0,00
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	267.407.400	261.130.800	150.000.000	149.300.000
	A	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>130.680.000</i>	<i>130.000.000</i>	<i>150.000.000</i>	<i>149.300.000</i>
	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	130.680.000	130.000.000	150.000.000	149.300.000
	B	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>136.727.400</i>	<i>131.130.800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	50.329.500	50.322.300	0,00	0,00
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	50.329.600	50.328.500	0,00	0,00
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.068.300	30.480.000	0,00	0,00
III		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.686.585.684	1.617.920.176	211.403.118	207.600.000
	A	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>535.935.495</i>	<i>479.104.300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.393.595	40.960.500	0,00	0,00
	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	494.541.900	438.143.800	0,00	0,00
	B	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>1.150.650.189</i>	<i>1.138.815.876</i>	<i>211.403.118</i>	<i>207.600.000</i>
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.930.100	3.637.600	0,00	0,00
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	598.000.000	595.840.000	198.000.000	197.100.000
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	548.720.089	539.338.276	13.403.118	10.500.000



IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	322.368.100	276.511.000	0,00	0,00
	A	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	322.368.100	276.511.000	0,00	0,00
		1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	322.368.100	276.511.000	0,00	0,00
V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	548.922.200	517.364.700	0,00	0,00
	A	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	548.922.200	517.364.700	0,00	0,00
		1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	385.484.600	376.631.500	0,00	0,00
		2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	163.437.600	140.733.200	0,00	0,00
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	32.698.900	32.406.700	0,00	0,00
	A	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	32.698.900	32.406.700	0,00	0,00
		1 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17.984.900	17.772.700	0,00	0,00
		2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14.714.000	14.634.000	0,00	0,00
Jumlah			6.120.538.724	5.670.172.184	1.177.605.313	1.160.475.000

1. BELANJA OPERASI

Alokasi anggaran untuk Belanja Operasi OPD Kecamatan Gelumbang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.120.538.724,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 5.670.172.184,00 atau sebesar 92,64%. Anggaran belanja operasi dialokasikan untuk 6 (Enam) program, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 2.964.838.808,00 atau 90,87% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 3.262.556.440,00.

Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 7.977.400,- atau 91,41% dari anggaran Rp. 8.727.400,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *cukup* dengan realisasi sebesar Rp. 2.556.500,00 atau 77,32% dari anggaran Rp. 3.306.500,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja realisasi tidak mencapai 80% karena efisiensi anggaran.

2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 2.413.200,00 atau 100% dari anggaran Rp. 2.413.200,00,-. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 3.007.700,00 atau 100% dari anggaran Rp. 3.007.700,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 2.204.074.813,00 atau 90,75% dari anggaran Rp. 2.428.753.733,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.681.813,00 atau 90,74% dari anggaran Rp. 2.425.360.733,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 3.084.500,00 atau 100% dari anggaran Rp. 3.084.500,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran Rp. 5.775.000,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat kurang*. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:
 1. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat kurang* dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0% Rp. 5.775.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja tidak terealisasinya anggaran subkegiatan ini dikarenakan adanya pertukaran (mutasi) aset pada bulan Oktober 2024 berupa mobil jabatan Camat dari Kecamatan Gelumbang ke Kecamatan Rambang dimana mobil jabatan Camat Rambang asuransinya telah direalisasikan pada bulan Januari 2024 sedangkan mobil jabatan Camat Gelumbang jatuh tempo asuransinya pada bulan November 2024.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 38.567.900,00 atau 62,63% dari anggaran Rp. 61.582.900,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang*. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 18.990.000,00 atau 85,71% dari anggaran Rp. 22.155.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 2. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang* dengan realisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau 27,78% dari anggaran Rp. 27.000.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja rendahnya realisasi disebabkan ada biaya setor bimbingan teknis yang diikuti dibayar oleh Bappeda Kabupaten Muara Enim.
 3. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 12.077.900,00 atau 97,18% dari anggaran Rp. 12.427.900,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 594.589.847,00 atau 97,09% dari anggaran Rp. 612.386.592,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) subkegiatan, yaitu:
1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 206.989.000,00 atau 96,96%. dari anggaran Rp. 213.479.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 12.947.000,00 atau 90,36% dari anggaran Rp. 14.328.092,00,-. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
3. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp 64.509.100,00 atau 92,94% dari anggaran Rp. 69.410.400,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang* dengan realisasi sebesar Rp. 5.920.200,00 atau 57,26% dari anggaran Rp. 10.339.900,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja persentase realisasi tidak mencapai 80% karena efisiensi anggaran.
5. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp 15.930.000,00 atau 96,47% dari anggaran Rp. 16.513.200,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
6. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 288.294.547,00 atau 99,99% dari anggaran Rp. 288.316.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 91.177.848,00 atau 87,20% dari anggaran Rp. 104.565.753,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *cukup*. Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 6.290.000,00 atau 99,93% dari anggaran Rp. 6.294.400,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *cukup* dengan realisasi sebesar Rp 51.957.848,00 atau 79,52% dari anggaran Rp. 65.341.353,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja persentase realisasi tidak mencapai 80% karena sesuai dengan pemakaian listrik.
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 3.650.000,00 atau 100% dari anggaran Rp. 3.650.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
4. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 29.280.000,00 atau 100% dari anggaran Rp. 29.280.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 31.125.700,- atau 93,71% dari anggaran Rp. 33.213.588,- masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) subkegiatan, yaitu:
 1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *kurang* dengan realisasi sebesar Rp. 5.147.000,00 atau 37,74% dari anggaran Rp 13.637.081,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja persentase realisasi tidak

mencapai 80% karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dan suku cadang yang masih dalam kondisi baik.

2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 14.314.000,00 atau 92,84% dari anggaran Rp. 15.417.981,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat kurang* dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran Rp. 2.720.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti hanya saja persentase realisasi tidak mencapai 80% karena kode rekening honorarium pejabat pengadaan mengalami kendala pada saat penginputan pertanggungjawaban pada sistem (SIPD).

4. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 7.630.000,00 atau 100% dari anggaran Rp. 7.630.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 267.407.400,00 atau 97,65%. dari target yang direncanakan sebesar Rp. 261.130.800,00.

Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan realisasi sebesar Rp. 130.000.000,- atau 99,48% dari anggaran

Rp. 130.680.000,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 130.000.000,- atau 99,48% dari anggaran Rp. 130.680.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan realisasi sebesar Rp. 131.130.800,00 atau 95,91% dari anggaran Rp. 136.727.400,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 50.322.300,00 atau 99,99% dari anggaran Rp. 50.329.500,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 50.328.500,00 atau 100% dari anggaran Rp. 50.329.600,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 30.480.000,00 atau 84,51% dari anggaran Rp. 36.068.300,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 1.686.585.684,00 atau 95,93% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1.617.920.176,00

Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan realisasi sebesar Rp. 479.104.300,00 atau 89,40% dari anggaran Rp. 535.935.495,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 40.960.500,00 atau 98,95% dari anggaran Rp. 41.393.595,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 438.143.800,00 atau 88,60% dari anggaran Rp. 494.541.900,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan realisasi sebesar Rp. 1.138.815.876,00 atau 98,97% dari anggaran Rp. 1.150.650.189,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 3.637.600,00 atau 92,56% dari anggaran Rp. 3.930.100,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 792.940.000,00 atau 99,62%. dari anggaran Rp 796.000.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 539.338.276,00 atau 98,29% dari anggaran Rp. 548.720.089,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,7 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 322.368.100,00.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,77% dari anggaran Rp. 322.368.100,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik*.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,77% dari anggaran Rp. 322.368.100,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 517.364.700,00 atau 94,25% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 548.922.200,00.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 517.364.700,00 atau 94,25% dari anggaran Rp. 548.922.200,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 376.631.500,00 atau 97,70% dari anggaran Rp. 385.484.600,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *baik* dengan realisasi sebesar Rp. 140.733.200,00 atau 86,11% dari anggaran Rp. 163.437.600,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 32.406.700,00 atau 99,11% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 32.698.900,00.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan realisasi sebesar Rp. 32.406.700,00 atau 99,11% dari anggaran Rp. 32.698.900,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:
1. Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 17.772.700,00 atau 98,82% dari anggaran Rp. 17.984.900,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.
 2. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 14.634.000,00 atau 99,46% dari anggaran Rp. 14.714.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. BELANJA MODAL

Alokasi anggaran untuk Belanja Modal OPD Kecamatan Gelumbang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.177.605.313,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.160.475.000,00 atau sebesar 98,55 %. Anggaran belanja modal dialokasikan untuk 3 (Tiga) program, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 803.575.000,00 atau 98,45% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 816.202.195, 00.

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 114.065.000,00 atau 99,94% dari anggaran

Rp. 117.137.660,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 114.065.000,00 atau 99,94% dari anggaran Rp. 117.137.660,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 153.210.000,00 atau 95,23% dari anggaran Rp. 160.885.275,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 28.210.000,00 atau 90,98% dari anggaran Rp. 31.008.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Pengadaan Mebel
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 125.000.000,00 atau 96,24% dari anggaran Rp. 129.877.275,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

c. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi sebesar Rp. 536.300.000,00 atau 97,52% dari anggaran Rp. 538.179.260,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 536.300.000,00 atau 97,52% dari

anggaran Rp. 538.179.260,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 149.300.000,00 atau 99,53% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan realisasi sebesar Rp. 149.300.000,00 atau 99,53% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 149.300.000,00 atau 99,53% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini secara umum masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 207.600.000,00 atau 98,20% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 211.403.118,00.

Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan realisasi sebesar Rp. 207.600.000,00 atau 98,20% dari anggaran Rp. 211.403.118,00 masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik*. Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) subkegiatan, yaitu:

1. Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *sangat baik* dengan realisasi sebesar Rp. 197.100.000,00 atau 99,55% dari anggaran Rp. 198.000.000,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

2. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Subkegiatan ini masuk dalam kategori pencapaian sasaran *cukup* dengan realisasi sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 78,34% dari anggaran Rp. 13.403.118,00. Dalam pelaksanaannya subkegiatan ini tidak mengalami kendala yang berarti.

D. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan menggeser pagu sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dihapus/digeser/tidak efektif	Alasan Utama	Nilai Anggaran (Rp.)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan lebih sedikit dari jumlah pegawai yang telah dianggarkan	543.300.939
Total jumlah program/kegiatan yang dihapus: 1 Program 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan			Total Efisiensi Anggaran: Rp. 543.300.939,-



BAB IV PENUTUP

A. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gelumbang pada Tahun 2024 beserta solusinya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Adanya sekolah SD/SMP yang kekurangan ruang kelas akibat banyaknya warga usia sekolah dalam wilayah kecamatan gelumbang yang tidak seimbang dengan penambahan ruang kelas SD/SMP	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Gelumbang untuk dijadikan usulan prioritas pada forum OPD
2.	Masih tingginya pernikahan dini dalam Wilayah Kecamatan Gelumbang	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa penyuluhan langsung ke Desa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Terlambatnya penyelesaian/realisasi pembangunan fisik Dana Desa disebabkan keterlambatan pembuatan RAB karena terbatasnya Tenaga yang berkompeten dibidang tersebut sedangkan Desa di wilayah Kecamatan Gelumbang yaitu 22 Desa dengan 1 orang Tenaga Pendamping Desa Teknik (PDTI)	Permohonan penambahan Pendamping Desa Teknik (PDTI)
4.	Fasilitas pelayanan yang belum mencukupi seperti belum adanyas ruang laktasi, area bermain untuk anak-anak, sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka, serta sarana prasarana untuk kelompok rentan (disabilitas).	Pembenahan ruang untuk mencukupi ruang/sarana yang belum ada

Sumber : Seksi-Seksi Kecamatan Gelumbang, 2024.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2024, yakni :



1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Gelumbang merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dilakukan berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintahan dengan total 6 (Enam) program, program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan indikator kinerja input, output dan outcome.
 - a. Pencapaian sasaran sangat baik ($\geq 91\%$) terdiri atas 5 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,39%, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 98,33%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 96,18%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 94,25% dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 99,11%.
 - b. Pencapaian sasaran baik (81% - 90%) terdiri atas 1 program yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 85,77%.
 - c. Pencapaian sasaran cukup (71% - 80%) terdiri atas 0 program.
 - d. Pencapaian sasaran kurang $\leq 70\%$ terdiri atas 0 program.
4. Hasil Pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis terhadap indikator kinerja setingkat outcome dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu **sangat baik** dengan tingkat capaian $\geq 91\%$, **baik** dengan tingkat capaian 81% - 90%, **cukup** dengan tingkat capaian 71% - 80% dan **kurang** dengan tingkat capaian $\leq 70\%$ dan **sangat kurang** dengan tingkat capaian 0 %.



Pencapaian sasaran OPD Kecamatan Gelumbang terdiri atas 2 sasaran semuanya atau 100% dari total sasaran masuk dalam kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian di atas 91% hingga melampaui 100%.

5. Pada tahun 2024 untuk OPD Kecamatan Gelumbang dialokasikan belanja operasi sebesar Rp. 6.120.538.724,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.670.172.184,00 atau 92,64% dan belanja modal sebesar Rp 1.177.605.313,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.160.475.000,00 atau sebesar 98,55%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Gelumbang Tahun 2024 ini dibuat, kiranya dapat menjadi masukan guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terimakasih.

Gelumbang, 31 Januari 2025

CAMAT GELUMBANG



HERRY MULYAWAN, S.P., MM

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19720508 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herry Mulyawan, S.P., MM
Jabatan : Camat Gelumbang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henky Putrawan
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim, 2024

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Muara Enim

Pihak Pertama,

Camat Gelumbang

Henky Putrawan

Herry Mulyawan, S.P., MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197205081999031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN GELUMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
		2. Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%
		3. PKK Aktif	100%
		4. Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%
		5. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%
		6. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	BB

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 386.927.400,-	APBD
2.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.401.982.688,-	APBD
3.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 291.548.100,-	APBD
4.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 542.717.200,-	APBD
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 32.698.900,-	APBD

Muara Enim,

2024

Pj. Bupati Muara Enim

Camat Gelumbang

Henky Putrawan

Herry Mulyawan, S.P., MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197205081999031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herry Mulyawan, S.P., MM
Jabatan : Camat Gelumbang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Henky Putrawan
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Enim,

2024

Pihak Kedua,

Pj. Bupati Muara Enim

Henky Putrawan

Pihak Pertama,

Camat Gelumbang

Herry Mulyawan, S.P., MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197205081999031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN GELUMBANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik
		2. Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%
		3. PKK Aktif	100%
		4. Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%
		5. Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%
		6. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 386.927.400,-	APBD
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.401.982.688,-	APBD
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 291.548.100,-	APBD
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 542.717.200,-	APBD
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 32.698.900,-	APBD

Muara Enim,

2024

Pj. Bupati Muara Enim

Henky Putrawan

Camat Gelumbang

Herry Mulyawan, S.P., MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 197205081999031003